

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori dan konsep penelitian yang dijadikan sebagai landasan dan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu. Selain itu, juga akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang digambarkan dalam bentuk skema untuk memperjelas maksud dari penelitian dan pengembangan hipotesis berdasarkan teori pendukung dan penelitian sebelumnya.

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) dapat dikatakan suatu dasar teori yang membuat model proses kontrak antara dua orang atau lebih. Teori keagenan (*agency theory*) dipopulerkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1996). Teori ini muncul ketika ada hubungan kontrak kerja sama antara manager dan pemegang saham yang digambarkan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen), *principal* (pemegang saham). Hubungan kontrak kerja sama tersebut berupa pemberian wewenang oleh *principal* kepada *agent* untuk bekerja demi pencapaian tujuan *principal*. Manajer diangkat oleh pemilik untuk menjalankan operasional perusahaan karena pemegang saham memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan.

Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut sebagai agen dan pemilik modal (*owner*) sebagai *principal* membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “*nexus of contract*”. Kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti *profit* yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*) (Fahmi, 2014).

Literatur akuntansi mengenai pengungkapan sukarela seringkali mengacu kepada konsep keagenan dengan menyediakan dorongan untuk melakukan pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela pada *website* perusahaan atau IFR terhadap laporan keuangan. Dorongan tersebut ditunjukkan pada literatur sebagai alat penggerak yang dipakai untuk mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal* (Rizki *et al.*, 2018).

Asimetri informasi dan perilaku manajer yang mementingkan diri sendiri memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Kondisi ini mengarah pada tata kelola perusahaan yang kurangnya keterbukaan transparansi tentang kinerja perusahaan ke prinsipal (Puspitaningrum & Atmini, 2012). Teori keagenan terkait erat dengan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola dalam suatu organisasi.

Puspitaningrum & Atmini (2012); Kaihatu (2006) menyatakan bahwa pengungkapan dan transparansi adalah aspek penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Teori keagenan menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan pengungkapan dengan tata kelola perusahaan (Puspitaningrum & Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001). Mekanisme tata kelola perusahaan diterapkan untuk mengendalikan masalah keagenan dan memastikan perilaku manajer sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dalam perspektif teori agensi, ada dua hubungan antara kebijakan pengungkapan perusahaan yaitu hubungan komplementer substitusi. Hubungan komplementer terjadi ketika mekanisme tata kelola perusahaan, memperkuat kontrol internal dan meminimalkan kemungkinan bagi manajer untuk menahan informasi demi kepentingan mereka sendiri (Puspitaningrum & Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001). Hal ini mengarah pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan pengungkapan yang komprehensif. Oleh karena itu, jika tata kelola perusahaan saling melengkapi, dan kemudian dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan, perusahaan juga akan cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela. Di sisi lain, hubungan substitusi muncul ketika mekanisme tata kelola dapat mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajer yang menurun karena adanya pemantauan dan pengungkapan (Puspitaningrum & Atmini, 2012; Simon & Wong, 2001).

2.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Berdasarkan Teori sinyal, jika manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan masa depan yang tinggi di perusahaan, mereka akan mencoba memberi sinyal kepada investor melalui akun. Manajer perusahaan lain yang berkinerja baik akan mendapatkan insentif yang sama dan manajer perusahaan dengan berita netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dan berita buruk akan mendapat insentif untuk tidak melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka, untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana saham mereka diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk memberi sinyal informasi ke pasar modal, teori pensinyalan memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi yang diminta (Godfrey, 2012).

Konsekuensi logis dari teori pensinyalan adalah insentif bagi semua manajer untuk menandakan ekspektasi laba di masa depan karena, jika investor percaya sinyal, harga saham akan meningkat dan pemegang saham (manajer yang bertindak demi kepentingan mereka) akan mendapat manfaat. Agar sinyal melalui akun dapat dipercaya oleh pengguna, sinyal itu tidak boleh dengan mudah dan tanpa biaya direplikasi oleh perusahaan lain. Biaya dapat mencakup hilangnya kredibilitas jangka panjang jika kinerja aktual tidak sesuai dengan level yang telah ditandai melalui cara di mana profitabilitas telah diwakili dalam akun (Godfrey, 2012).

Model sinyal dividen membahas ketidaksempurnaan pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang relevan, yaitu *asymmetric information*. Jika manajer mengetahui bahwa perusahaan mereka “kuat” sementara investor untuk beberapa alasan tidak mengetahui hal ini, maka manajer dapat membayar dividen (atau secara agresif membeli kembali saham) dengan harapan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar. Sinyal secara efektif memisahkan perusahaan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan yang lemah (sehingga perusahaan yang kuat dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar), itu menjadi mahal untuk sebuah perusahaan yang lemah untuk meniru tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat (Godfrey, 2012).

Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang (*good news*) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi

pasar. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan (Jogiyanto, 2014).

2.3 Komite Audit

2.3.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit ialah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014).

Hartono & Nugrahanti (2014); Tjager *et al.*, (2003), mengungkapkan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK 55/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Arens *et al.*, (2010), menjelaskan pengertian komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih dengan

tanggung jawabnya untuk membantu auditor independen dari manajemen. Komite audit terdiri dari tiga hingga lima atau sebanyak tujuh direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan.

Sedangkan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKGC), komite audit ialah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

2.3.2 Tujuan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/2016 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektifnya suatu sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang berasal dari komisaris

independen dan /atau pihak dari luar perusahaan efek. Komite audit wajib diketuai oleh komisaris independen yang merangkap sebagai anggota komite audit.

Beberapa rujukan perusahaan Amerika yang mengacu pada *Securities and Exchange Commission* (SEC), pada umumnya mencantumkan dalam *charter* komite auditnya, bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi:

- 1). Integritas dari laporan keuangan perusahaan.
- 2). Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau auditor eksternal.
- 3). Kinerja dari auditor internal dan auditor eksternal perusahaan.
- 4). Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan karakteristik tersebut, otoritas komite audit terkait pada batasan mereka sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas eksekusi apapun, hanya memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal yang spesifik yang telah memperoleh hak suara eksplisit dari dewan komisaris, misalnya ialah mengevaluasi dan menentukan kompensasi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus.

2.3.3 Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab komite audit tidak boleh menyimpang dari tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. Tugas komite audit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016, ialah:

- a). Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- b). Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya;
- c). Memberikan penelaahan atas rencana dan pelaksanaan audit oleh akuntan; dan
- d). Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko perusahaan efek.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab memberikan pengawasan menyeluruh mengenai:

- 1). Laporan keuangan komite audit melaksanakan pengawasan independen dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya.

2). Pengawasan Kontrol

Komite audit memberikan pengawasan independen atas masalah atau hal-hal yang berpotensi mengandung resiko.

3). Tata Kelola Perusahaan

Komite audit melakukan pengawasan independen bahwa proses pelaksanaan GCG telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Wewenang Komite Audit harus meliputi:

- 1). Melakukan penyelidikan mengenai semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
- 2). Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.
- 3). Mengusahakan saran hukum dan saran professional lainnya yang independen jika diperlukan.
- 4). Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, jika diperlukan.

Agoes (2014); Surya & Yustiavandana (2006), menyatakan bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit ialah membantu dewan komisaris, antara lain:

- 1). Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
- 2). Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).

- 3). Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).
- 4). Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

2.3.4 Syarat Anggota Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016. Syarat menjadi anggota komite audit ialah:

- a). Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik;
- b). Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan efek, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham pengendali perusahaan efek;
- c). Bukan orang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan efek yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
- d). Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada perusahaan efek;

- e). Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan efek;
- f). Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan efek, proses audit, manajemen resiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- g). Paling kurang satu diantara anggota komite audit berlatar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.3.5 Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK.04/tahun 2016, Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 bulan. Rapat komite audit diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, membuat laporan

tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Buallay (2018); DeZoort *et al.*, (2002) menetapkan frekuensi pertemuan sebagai evaluasi audit *due diligence* komite. Frekuensi pertemuan adalah elemen inti dalam keandalan dan efisiensi kegiatan dan proses perusahaan, meskipun ada beberapa studi yang mengakui hubungan antara kinerja perusahaan dan jumlah pertemuan (Ioana, 2014). Frekuensi pertemuan merupakan karakteristik penting dari komite audit. Anggota dewan yang secara rutin bertemu lebih mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas tugas mereka. Dewan pengurus akan lebih efektif meningkatkan pengawasan atas proses pelaporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pilihan auditor eksternal dan komite audit (Buallay, 2018; Yatim *et al.* 2006). Buallay (2018); Abbott *et al.*, (2000); Beasley *et al.*, (2000) menemukan bahwa meningkatnya frekuensi pertemuan terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.3.6 Kompetensi Komite Audit

Kompetensi merupakan *professional* yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan *auditing*. Tugiman (2014) mengungkapkan bahwa, peningkatan kompetensi internal auditor secara signifikan dilakukan melalui

program sertifikasi profesi, baik sertifikasi tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk mengembangkan kompetensi komite audit dibutuhkan keahlian dan pelatihan, namun tetap mengikuti perkembangan zaman dan terus menjaga tingkat kemampuannya selama karir profesinya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-211/KJF/2010 mengenai kompetensi auditor bahwa, Kompetensi Auditor ialah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Dengan keputusan tersebut, maka seorang auditor dapat dikatakan kompeten jika memiliki pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan agar dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kompetensi seseorang juga memiliki pengaruh positif terhadap pekerjaan yang dilakukannya yaitu sejauh mana peran orang itu dapat dinilai sebagai individu dalam pengambilan keputusan dan efektif dalam penyelesaian pekerjaannya.

2.4 Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2015:1), Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Wahyudiono (2014:10), mengemukakan bahwa laporan keuangan ialah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya untuk pihak-pihak luar perusahaan.

Kasmir (2016:7), mengemukakan bahwa pengertian laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Fahmi (2012:21), mengemukakan bahwa, pengertian laporan keuangan ialah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Gitman (2012), mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan tahunan yang harus disediakan oleh perusahaan publik untuk

pemegang saham, yang merangkum dan mendokumentasikan 2 kegiatan keuangan perusahaan selama setahun terakhir.

Subramanyam (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah produk proses laporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, intensif manajer, serta mengenai mekanisme pelaksanaan dan juga pengawasan perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

2.5.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No.1 (2015:3), Tujuan Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015:3), tujuan laporan keuangan ialah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan Fahmi (2012:28) menyatakan, tujuan utama dari laporan keuangan ialah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna informasi mengenai posisi keuangan entitas yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan sehingga dapat berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi.

2.5.3 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK No. 1 (2015), Komponen laporan keuangan ialah:

- 1). Neraca pada akhir periode
- 2). Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- 3). Laporan perubahan ekuitas selama periode
- 4). Laporan arus kas selama periode
- 5). Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

- 5.1). Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A
- 6). Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklarifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.5 Peran Internet dalam Mengkomunikasikan Informasi Keuangan

Beberapa karakteristik internet sangat relevan untuk pelaporan keuangan. Sebagai media komunikasi, internet mempengaruhi aspek komunikatif dari pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, interaksi, dan penyajian serta presentasi (Ghanem, 2016; Xiao *et al.*, 2002).

- a. Akses dan Distribusi semakin mudah dan global.
- b. Fitur *world wide web* seperti *hypertext*, *hyperlinks* menyediakan potensi untuk merubah cara penyajian laporan keuangan, informasi keuangan akan dapat dihubungkan langsung dengan informasi non keuangan.
- c. Komunikasi informasi keuangan kepada *stakeholder* dapat dilakukan secara interaktif.

2.5.1 Dampak Internet terhadap Pelaporan Keuangan

Internet akan membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan dalam: metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses informasi, frekuensi pelaporan, bahasa yang digunakan, maupun permasalahan politis dan sosiologis (Ghanem, 2016; Xiao *et al.*, 2002).

- a. Meningkatkan penyajian informasi kualitatif dan non keuangan.

Dalam industri yang intensif teknologi, investor akan menilai lebih informasi non keuangan dan berusaha untuk melakukan penyesuaian kembali atas laba yang dilaporkan (Ghanem, 2016; Xiao *et al.*, 2002; Amir & Lev, 1996).

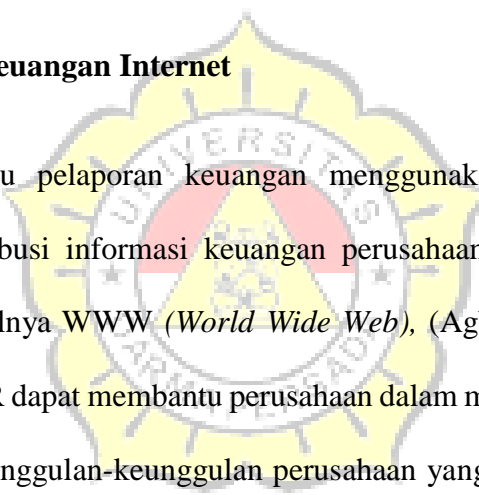
- b. Meningkatkan *disclosure*. Peningkatan ekspektasi pengguna informasi keuangan dan permintaan akan informasi spesifik individual akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan informasi yang disediakan.

- c. Keberadaan laporan keuangan tertulis (tradisional). Berkaitan dengan keberadaan laporan keuangan tradisional, para ahli berpandangan bahwa laporan keuangan tradisional akan masih tetap ada dan digunakan untuk memverifikasi akurasi dari informasi keuangan yang ada di Internet (Ghanem, 2016; Xiao *et al.*, 2002).

- d. Dampak terhadap pengguna informasi keuangan. Pengguna informasi keuangan di tempat yang jauh dan terpencil akan sangat terbantu dengan adanya penyajian informasi keuangan lewat Internet.

- e. Dampak terhadap peraturan dan standar akuntansi. Internet akan meningkatkan kebutuhan akan standar dan peraturan global. Internet akan semakin mendorong ke arah harmonisasi standar atau penggunaan standar Internasional.
- f. Dampak terhadap audit. Internet akan mendorong timbulnya *real-time* pelaporan keuangan, sehingga akan dibutuhkan sistem audit berkelanjutan yang dilakukan oleh auditor (Ghanem, 2016; Xiao *et al.*, 2002; Rezaee *et al.*, 2000; Richardson & Scholz, 1999).

2.6 Pelaporan Keuangan Internet



IFR atau pelaporan keuangan menggunakan internet didefinisikan sebagai distribusi informasi keuangan perusahaan menggunakan teknologi internet, misalnya WWW (*World Wide Web*), (Agboola, 2012; Ashbaugh *et al.*, 1999). IFR dapat membantu perusahaan dalam menyebarkan informasi mengenai keunggulan-keunggulan perusahaan yang merupakan sinyal positif perusahaan untuk menarik investor. Hal ini berarti, IFR merupakan sarana untuk mengkomunikasikan sinyal positif perusahaan kepada publik, terutama investor.

Praktik IFR berkembang pesat dari waktu ke waktu. (Jones *et al.* 2003; Deller *et al.* 1999) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar di Eropa, Amerika dan Australia menggunakan internet sebagai media alternatif untuk pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun fenomena IFR

berkembang pesat akhir-akhir ini, akan tetapi masih banyak juga perusahaan-perusahaan yang memilih untuk tidak melakukan praktik IFR. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan untuk menerapkan IFR atau tidak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktek IFR adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, jenis industry, *leverage*, reputasi auditor, dan umur *listing* perusahaan.

2.6.1 Manfaat Pelaporan Keuangan Internet

Manfaat pelaporan keuangan menggunakan internet diantaranya adalah sebagai berikut (Suripto, 2015):

- 1). Meningkatkan efisien biaya, karena menurunkan biaya produksi dan distribusi yang berhubungan dengan laporan tahunan cetakan dan menekan jumlah permintaan laporan keuangan yang bukan pemegang saham.
- 2). Memperbaiki akses pemakai terhadap informasi dengan: Fleksibilitas akses yang tidak berurutan terhadap informasi dengan menggunakan *hyperlink*, menyediakan informasi lebih banyak dibanding yang tersedia dalam laporan cetakan tahunan, menyediakan informasi *realtime* dan menyediakan informasi dalam cara interaktif.

2.6.2 Keunggulan Pelaporan Keuangan Internet

Beberapa keunggulan pelaporan keuangan internet (Suripto, 2015), antara lain:

- 1). Adanya fasilitas yang memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan murah disbanding mengirim surat atau menelepon ke perusahaan.
- 2). Dapat menyajikan informasi yang lebih terinci dibandingkan yang dimungkinkan oleh laporan tahunan tradisional (Suripto, 2015; Kaplan, 1996).
- 3). Pelaporan keuangan menggunakan internet memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan keuangan yang tidak ringkas dan data keuangan tambahan (misalnya penjualan mingguan atau kuartalan dalam website) (Suripto, 2015; Ashbaugh *et al.*,1999).
- 4). Dapat menyediakan informasi terkini melalui pemeliharaan secara teratur terhadap *website* (Suripto, 2015; FASB,2000).
- 5). Pengguna internet untuk penyajian laporan keuangan dapat meningkatkan relevansi informasi melalui peningkatan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. (Suripto, 2015; Ashbaught *et al.*, 1999).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
1	<i>The effect of audit committee effectiveness and audit quality on corporate voluntary disclosure quality</i> (2018) Ben Kwame Agyei-Mensah	Independen: X1: Efektivitas Komite Audit X2: Jenis Auditor X3: Audit Fee X4: Audit Tenure Kontrol: K1: Ukuran Dewan K2: Profitabilitas K3: Leverage Dependen: Y: Kualitas Pengungkapan Sukarela	Efektivitas komite audit auditor dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.
2	<i>Do audit committee structure increases influence the level of voluntary corporate governance disclosures?</i> (2018) Shabana Talpur, Mohd Lizam, Shafie Mohammad Zabri	Independen: X1: Ukuran Komite Audit X2: Komite Audit Independen X3: Frekuensi Pertemuan Komite Audit Kontrol: K1: Usia Perusahaan, K2: Daftar Pasar Perusahaan K3: Ukuran Perusahaan Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Ukuran Komite Audit dan Pertemuan Komite Audit memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Pengungkapan Sukarela Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3	<i>Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies</i> (2018) Cristina Abad dan Francisco Bravo	Independen: X1 : Keahlian akuntansi dari anggota komite audit Kontrol: K1 : Komite Audit K2 : Dewan Independen K3 : Ukuran Perusahaan K4 : Leverage K5 : ROA K6 : Industri Dependen : Y: Pengungkapan Informasi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keahlian akuntansi dan keahlian keuangan non-akuntansi tidak memiliki hubungan. ukuran komite audit berkorelasi positif dengan jumlah ahli keuangan non-akuntansi tetapi tidak dengan ahli akuntansi.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
4	<i>Do compositions of board and audit committee improve financial disclosures?</i> (2017) Arunima Haldar dan Mehul Raithatha.	Independen : X1 : Corporate governance (Board and Committee Structure) Dependen : Y : Financial disclosure Kontrol : K1 : Ukuran Perusahaan K2 : Umur K3 : Leverage	Studi ini menunjukkan bahwa kualitas praktik tata kelola secara signifikan meningkatkan praktik pengungkapan keuangan perusahaan. Khususnya, komposisi komite audit efektif dalam meningkatkan pengungkapan.
5	<i>Voluntary disclosure and corporate governance: empirical evidence from Kuwait</i> (2017) Mishari M. Alfraih Abdullah M. Almutawa	Independen: X1: Direktur Non Eksekutif X2: Cross Directionship X3: Kepemilikan anggota keluarga X4: Ukuran Dewan X5: Kepemilikan Pemerintahan X6: Dualitas Peran X7: Komite Audit X8: Kepemilikan Keluarga Kontrol: K1: Cross listing Cross K2: Ukuran Perusahaan K3: Leverage K4: Perumbuhan Perusahaan K5: Profitabilitas K6: Tipe Industri K7: Tipe Auditor Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela	Komite audit tidak memiliki hubungan yang positif atas tingkat pengungkapan sukarela
6	<i>The effect of board of directors and audit committee effectiveness on Internet financial reporting: evidence from Gulf Co-Operation Council Countries</i> (2016) Bin Ghanem	Independen : X1 : Efektifitas Dewan Direktur (Ukuran Dewan, Independensi Dewan, Rapat Dewan, Komite Dewan) X2 : Efektifitas Komite Audit (Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, Pertemuan Komite Audit) Kontrol: K1: Ukuran Perusahaan K2: Profitabilitas K3: Leverage K4: Negara Dependen : Y1 : IFR Skor total Y2 : IFR Konten Y3 : IFR Presentasi	Efektifitas komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap IFR skor total, konten dan presentasi.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
7	<i>Audit Committee Impact on the Quality of Financial Reporting and Disclosure: Evidence from the Tehran Stock Exchange</i> (2016) Salehi M. dan Shirazi M.	Independen: X1: Anggota Komite Audit Independen X2: Keahlian Keuangan Komite Audit X3: Frekuensi Pertemuan Komite Audit X4: Ukuran Komite Audit Kontrol: K1: Ukuran Perusahaan K2: Tipe Industri Dependen: Y1: Kualitas Pengungkapan keuangan Y2: Kualitas Laporan Keuangan	Keahlian keuangan komite audit memiliki hubungan signifikan negative terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan Ukuran Komite Audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan keuangan, Sedangkan Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap Kualitas Pengungkapan keuangan.
8	<i>“Effect of Corporate Governance on the level of Internet Financial Reporting: Evidence from Turkish Companies</i> (2015), Parlakkaya, R., Kahraman, U. dan Cetin, H.	Independen: X1: Persentase kepemilikan manajemen, X2: kepemilikan pemegang saham utama, X3: jumlah anggota independen dari dewan direksi, X4: frekuensi pertemuan tingkat pendidikan komite audit X5: anggota komite audit, Dependen: Y: Internet Financial Reporting	Frekuensi pertemuan tingkat pendidikan komite audit dan anggota komite audit dengan internet financial reporting tidak memiliki hubungan yang signifikan.
9	<i>Dampak dari karakteristik dewan dan komite audit pada pengungkapan sukarela: Sebuah meta-analisis</i> (2015) Khaled Samaha, Hichem Khelif, Khaled Hussainey	Independen: X1: Ukuran Dewan X2: Komposisi Dewan X3: CEO Dualitas X4: Karakteristik Komite Audit Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela	Karakteristik Komite Audit memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
10	<p><i>Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics Disclosure</i> (2014) Rohana Othmana, Ili Farhana Ishakb, Siti Maznah Mohd Arifb, and Nooraslinda Abdul Arisb</p>	<p>Independen: X1: Komite Audit Independen X2: Keahlian Komite Audit X3: Frekuensi Pertemuan Komite Audit X4: Ukuran Komite Audit X5: Komite Audit Tenure X6: Anggota komite audit direksi</p> <p>Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela</p>	Keahlian komite audit, Frekuensi pertemuan komite audit dan Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Sukarela
11	<p><i>Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies</i> (2013) Marco Allegrini • Giulio Greco</p>	<p>Independen: X1: Dewan independen X2: Ukuran Dewan X3: Dualitas CEO X4: Pimpinan dewan Independen X5: Dewan Komite X6: Dewan dan komite audit ketekunan</p> <p>Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela</p>	Ukuran Dewan dan Pertemuan Komite Audit menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela
12	<p><i>Corporate Governance Mechanism and the Level of Internet Financial Reporting: Evidence from Indonesian Companies</i> (2012) Dara Puspitaningrum, sari Atmini</p>	<p>Independen : X1 : Kepeilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Blockholder X3 : Komisaris Independen X4 : Frekuensi Rapat Komite Audit X5 : Kompetensi Komite Audit</p> <p>Kontrol: K1 : Ukuran Perusahaan K2 : Profitabilitas K3 : Likuiditas K4 : <i>Leverage</i></p> <p>Dependen : Y : Tingkat Pengungkapan Sukarela berbasis Internet</p>	Frekuensi rapat komite audit mempengaruhi tingkat IFR secara positif, dan Kompetensi komite audit tidak mempengaruhi tingkat IFR secara positif.
13	<p><i>The effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure</i> (2012) Jing Li, Musa Mangena, Richard Pike</p>	<p>Independen: X1: Ukuran Komite Audit X2: Frekuensi Pertemuan Komite Audit X3: Komite Audit Independen X4: Audit Committee Financial Expertise</p> <p>Dependen: Y: Pengungkapan intelektual</p>	Ukuran Komite Audit dan Frekuensi Pertemuan Komite Audit memiliki hubungan yang signifikan dengan pengungkapan intelektual.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
14	<i>Internet Financial Reporting and corporate governance in Malaysia</i> (2011) Y. Kiew-Heong, Z. Saleh, dan M. Abessi	Independen : X1 : Komposisi Dewan X2 : Komite Audit X3 : Kepemilikan Konsentrasi – Top 5 Saham X4 : Bumiputra- <i>Controlled</i> X5 : Jumlah Kepemilikan Saham Dependensi : Y1 : Visibilitas Internet Y2 : Pelaporan Keuangan Internet	Frekuensi pertemuan komite audit dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap IFR.
15	<i>Determinants Of Corporate Internet Financial Reporting: Evidence from Egypt</i> (2010) Aly et al.	Independen: X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: <i>Leverage</i> X4: Tipe Industri X5: Tipe Auditor X6: tempat listing Dependensi: Y: <i>Internet Corporate Reporting</i>	Tipe Auditor tidak memiliki hubungan yang positif terhadap <i>Corporate Reporting</i> .
16	<i>The Impact of Corporate governance on Internet Financial Reporting</i> (2008) Andrea S. Kelton, Yawen Yang	Independen X1 : Hak-hak Pemegang Saham X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Kepemilikan Blockholder X4 : Proporsi Dewan Direktur Independen X5 : Dualitas CEO X6 : Keahlian Komite Audit X7 : Frekuensi Rapat Komite Audit Kontrol: K1: Ukuran Perusahaan K2: Profitabilitas K3: Peluang Pertumbuhan K4: Kebutuhan Model Ekuitas Eksternal baru K5: Informasi Asimetri K6: Tipe Auditor (<i>Big 4</i>) K7: Industri Dependensi : Y : Tingkat Pengungkapan Perusahaan berbasis Internet	Frekuensi rapat komite audit dan keahlian komite audit memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengungkapan berbasis internet, dan tipe auditor tidak memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengungkapan berbasis internet.

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
17	<i>Factors Influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies. Corporate Governance</i> (2006) Barako DG, Hancock P, Izan HY.	Independen: X1: Corporate Governance X2: Struktur Kepemilikan X3: Karakteristik Perusahaan Kontrol : K1: Tipe Industri Dependen: Y: Pengungkapan Sukarela	Komite Audit memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan Tipe Auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela.
18	<i>The determinants and characteristics of voluntary Internet - based disclosures by listed Chinese companies</i> (2004) Jason Zezhong Xiao, He Yang, Chee W. Chow	Independen : X1 : Kepemilikan Saham X2 : Direktur Independen X3 : Tipe Auditor X4 : Kepemilikan Asing X5 : Jenis Industri X6 : Pengaruh CSRC Dependen : Y : Tingkat Pengungkapan Perusahaan berbasis Internet	Tipe Auditor memiliki hubungan positif antara dengan praktek IFR di Cina.
19	<i>Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis</i> (2003) Andrew J. Felo, S.Krishnamurthy, Steven A. Solieri	Independen : X1: Keahlian Keuangan Komite Audit X2: Proporsi Anggota Komite Audit Independen X3: Ukuran Komite Audit Dependen: Y: Kualitas Laporan Keuangan	Keahlian keuangan komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

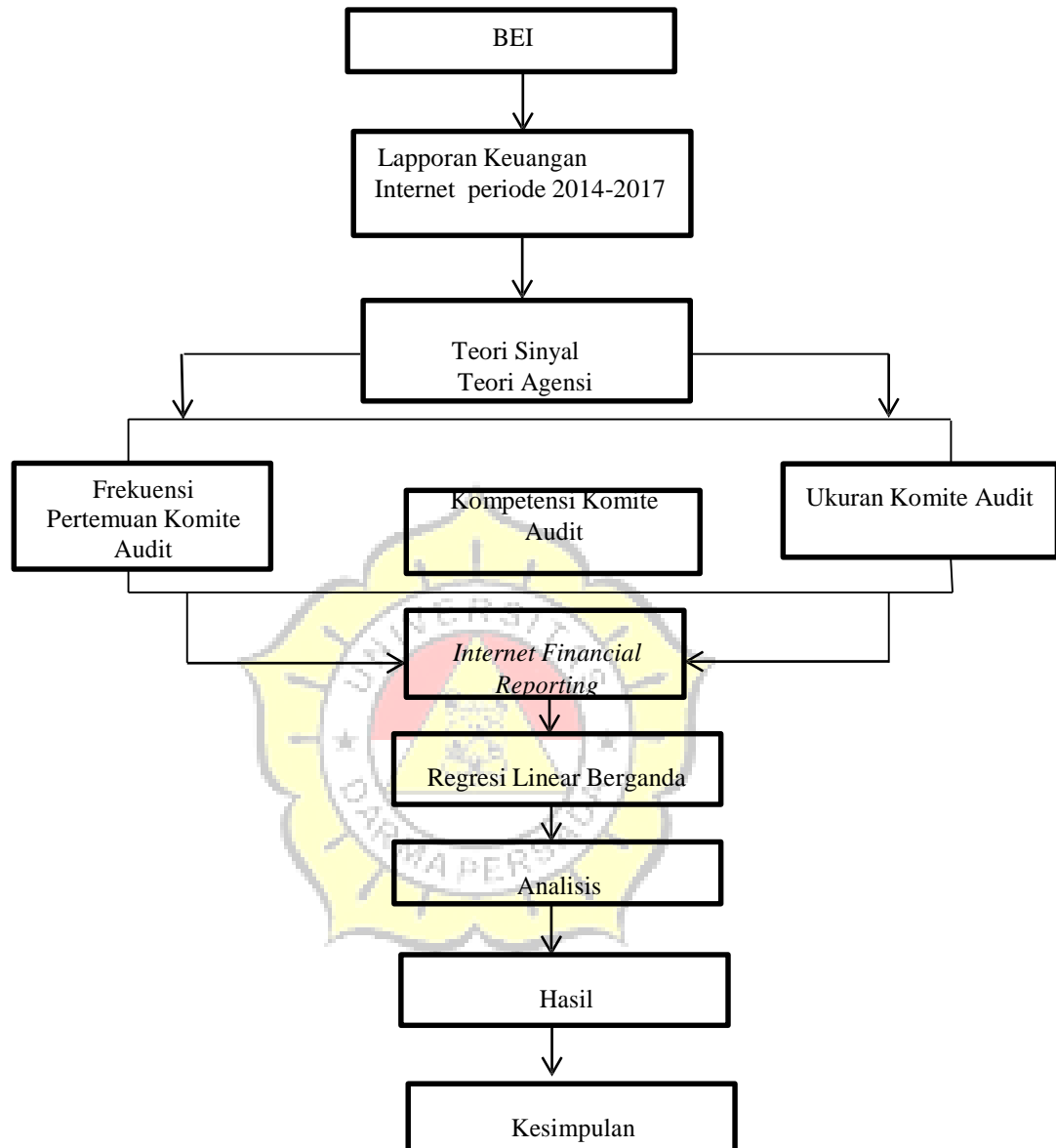
Sumber: Data Empiris Penelitian Terdahulu

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



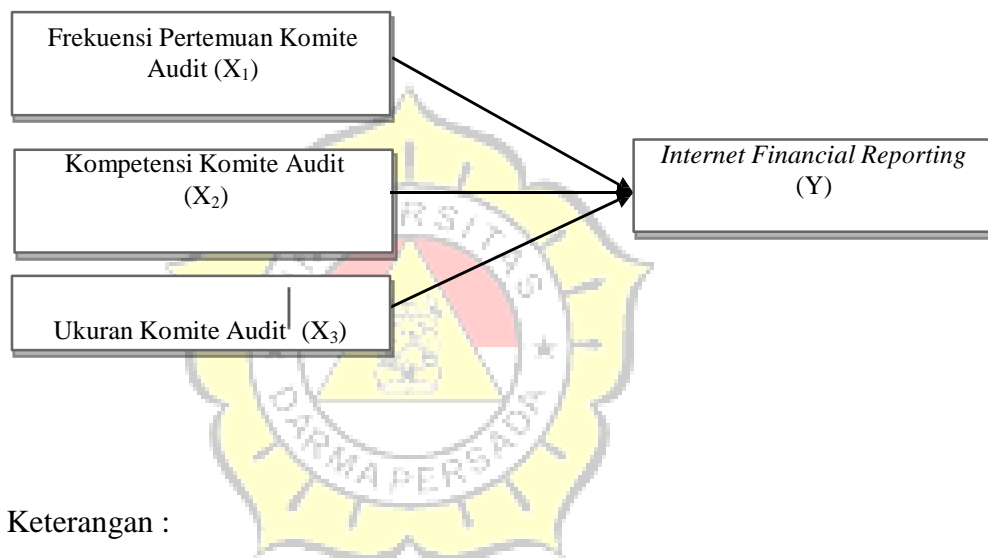
Penelitian ini mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan internet perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2013 -2017. Menggunakan teori agensi dan teori sinyal, untuk menemukan hubungan antara frekuensi pertemuan komite audit, kompetensi komite audit dan ukuran komite

audit terhadap IFR. Kemudian menggunakan pengukuran regresi linier berganda untuk menganalisis data yang ada dan dapat menemukan hasil. Dan yang terakhir adalah dibuat kesimpulan untuk memudahkan dalam membaca hasil.

2.9 Model Variabel

Gambar 2.2

Model Variabel



Keterangan :

- X₁ : Frekuensi pertemuan komite audit (jumlah frekuensi rapat yang dimiliki oleh komite audit dalam setahun)
- X₂ : Kompetensi komite audit (proporsi anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan/ atau akuntansi dengan jumlah total anggota komite audit)
- X₃ : Ukuran komite audit (jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan)
- Y : *Internet financial reporting (internet disclosure index*, dimana untuk setiap item yang diungkapkan akan diberi skor 1)

Model variabel ini dapat menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian yang dapat mempermudah mengenai pemahaman dan menganalisis masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan rapat komite audit, kompetensi komite audit dan ukuran komite audit terhadap pelaporan keuangan internet.

2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran & Bougie, 2017). Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

2.10.1 Pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap pelaporan keuangan internet

Kelton & Yang (2008) melakukan penelitian mengenai Frekuensi pertemuan komite audit terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR) yang menghasilkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR). Sejalan dengan penelitian Ghanem (2016); Puspitaningrum & Atmini (2012); Cormier *et al.* (2010) yang menemukan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh secara

positif dan signifikan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Heong *et al.*, (2011) tidak menemukan pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR). Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut:

H₁ : Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

2.10.2 Pengaruh kompetensi komite audit terhadap pelaporan keuangan internet

Kelton & Yang (2008) melakukan penelitian mengenai kompetensi komite audit terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR) yang menghasilkan bahwa keahlian keuangan komite audit memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR). Dan didukung oleh beberapa penelitian yang juga sejalan bahwa keahlian keuangan komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Ghanem, 2016; Allegrini & Greco, 2013; Barako *et al.*, 2006; Mangena & Pike, 2005; Abott *et al.*, 2003; Carcello & Neal, 2003; Felo *et al.*, 2003). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Puspitaningrum & Atmini (2012) menemukan bahwa kompetensi komite audit tidak berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengungkapan berbasis internet (IFR).

Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

2.10.3 Pengaruh ukuran komite audit terhadap pelaporan keuangan internet

Ghanem (2016) menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan IFR. Yang sejalan dengan penelitian Allegrini & Greco (2013); Kelton & Yang, (2008); Barako *et al.*, (2006); Mangena & Pike (2005); telah menemukan bahwa keberadaan dan/ atau komposisi komite audit memiliki dampak positif pada tingkat pengungkapan sukarela. Dan penemuan ini tidak sejalan dengan Abessi *et al.*, (2011) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan IFR. Berdasarkan penelitian tersebut maka penelitian ini berhipotesis sebagai berikut:

H₃ : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

